

**EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH  
KOTA DI KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG**

**Disusun dan Diusulkan oleh :**

**Hariyanto**

**Nomor Stambuk: 105 64 176 07**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2014**

**EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH  
KOTA DI KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan oleh :

Hariyanto  
Nomor Stambuk: 105 64 176 07

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2014**

## **PENGESAHAN PEMBIMBING**

Judul : Evaluasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Hariyanto

Nomor stambuk : 105 64 176 07

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Abdul Kadir Adys, SH, MM**

**A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si**

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

**Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**

**A. Luhur Prianto, S.IP. M.Si**

## **PENERIMAAN TIM**

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan Menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor :057/Fisipol-UMM/1435H/2014M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada Hari Sabtu tanggal 30 Agustus Tahun 2014

## **TIM PENILAI**

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Muhlis Madani, M.si**

**Drs. Muhammad Idris, M.si**

Penguji :

1. Dr. Djaelan Usman, M.Si (Ketua) ( )
2. Abdul Kadir Adys, SH, MM ( )
3. Drs. Muhammad Tahir, M.Si ( )
4. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si ( )

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NamaMahasiswa : Hariyanto

Nomor Stambuk : 105 64 176 07

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 18 Juli 2014

Yang Menyatakan

Hariyanto

## ABSTRAK

**HARIYANTO. 2014.** *Evaluasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys, MM, dan A. Luhur Prianto).*

Walaupun RUTRWK Bantaeng telah disahkan sebagai acuan rencana pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat ataupun pemerintah secara luas, tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa diantaranya pelaksanaan kebijakan pembangunan menyimpang dari peruntukan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota (RUTRWK) dimaksud. Atas ketidaksesuaian antara seharusnya dengan kegiatan dilapangan akan sangat berpengaruh negatif terhadap kelancaran, keterpaduan, kesinambungan dan kualitas pembangunan serta kelestarian alam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di temui dalam Evaluasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif digabung dengan kuantitatif dengan sampel purposive Sampling bertujuan peneliti memilih Informan atau Responden secara sengaja, 9 orang Informan dan 20 Masyarakat sebagai sampel di 4 BWK. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan Evaluasi Pelaksanaan RUTRWK kota Bantaeng dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor pendukung dalam pelaksanaan RUTRWK yaitu : (a). Responsivitas, Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui sosialisasi (b). Ketepatan, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan RUTRWK yaitu : (a). Efektifitas, pelaksanaan RUTRWK sangat tergantung pada keadaan topografi, (b).Kecukupan,(Keterbatasan dana, sangat sulit bagi pemerintah daerah memberikan dukungan dana untuk fasilitas Umum/sosial yang cepat guna mengimbangi kebutuhan masyarakat yang serba berubah secara cepat dan dinamis (c) Pemerataan, Keadaan Fisik Kota Bantaneng (mementingkan Ruang/wilayah yang strategis untuk membangun).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“ Assalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh “*

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah S.W.T , atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng “ dapat diselsesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Drs. Abdul Kadir Adys, MM sebagai Pembimbing I dan Bapak A. Luhur Prianto S.IP, M.Si sebagai Pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelktual yang tak ternilai harganya. Teriring Doa semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan Penghargaan dan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Irwan Akib, M.pd, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si Selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya, beliau telah berperan sebagai orang tua akademik bagi saya.
4. Segenap Dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini. Segenap staf tata usaha fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
5. Kepada Kepala BAPPEDA Bantaeng, Ketua DPRD Bantaeng, Camat Bantaeng dan Kepala Dinas Tata Ruang beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian hingga selesainya karya ini disusun.
6. Kedua orang tuaku tercinta atas segala bimbingan, kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanannya sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud serta doa semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungannya, dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi serta arahan-arahan selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

7. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan 07 yang banyak membantu dalam melengkapi data penelitian penulis ditengah kesibukannya, dan kepada seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan atas bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahuwataala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Juli 2014

Hariyanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Konsep Evaluasi .....	7
B. Konsep Kebijakan Publik .....	11
C. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik.....	14
D. Konsep Kelembagaan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Kota ....	19
E. Konsep dan Pengertian RUTRWK .....	23
F. Konsep Dasar Penyusunan RUTRWK/RIWK .....	25
G. Konsep Sasaran RUTRWK/RIWK.....	25

H.	Kerangka Konseptual .....	26
I.	Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian .....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
B.	Jenis dan Tipe Penelitian .....	31
C.	Sumber Data .....	32
D.	Populasi dan Sampel .....	32
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	34
F.	Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B.	Pelaksanaan Kebijakan Program Rencana Umum Tata Ruang Wilyah Kota Di Kecamatan Bantaeng .....	41
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran .....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
1.	Keadaan Jumlah Penduduk Desa / Kelurahan Di Kecamatan Bantaeng Tahun 2014 .....	38
2.	Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantaeng Tahun 2014.....	39
3.	Keadaan Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bantaeng Tahun 2010 – 2013 .....	39
4.	Tanggapan Respoden Tentang Kebutuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Pemerintahan Di Kota Bantaeng.....	46
5.	Penilaian Responden Tentang Pemanfaatan Ruang Untuk Penempatan Fasilitas Pemerintahan Di Kota Bantaeng.....	47
6.	Penilaian Responden Tentang Kebutuhan Sarana dan Prasarana pendidikan di Kecamatan Bantaeng .....	48
7.	Tanggapan Responden Tentang Penempatan Fasilitas Pendidikan di Kota Bantaeng .....	49
8.	Tanggapan Responden Tentang Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Bantaeng.....	50
9.	Tanggapan Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Ruang Untuk Penempatan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bantaeng .....	51
10.	Tanggapan Responden Mengenai Penempatan Fasilitas Peribadatan Di Kota Bantaeng.....	52
11.	Tanggapan Respodan Mengenai Kelancaran Pengaliran Air Di Kecamatan Bantaeng .....	53
12.	Tanggapan Responden Sehingga Tidak Berlangganan Air Minum Di Kota Bantaeng .....	54
13.	Tanggapan Responden Tentang Kebutuhan Listrik Di Kecamatan Bantaeng .....	55

14.	Tanggapan Responden Tentang efektifitas Keberhasilan Program RUTRWK Yang Sudah Di Laksanakan Di kota Bantaeng .....	57
15.	Tanggapan Responden Tentang Pencapaian Program RUTRWK Kepada Masyarakat di Kecamatan Bantaeng.....	58
16.	Tanggapan Responden Tanggapan Responden Tentang Meratanya Fasilitas Pembangunan Pemerintah Kepada Masyarakat Kota Bantaeng .....	59
17.	Tanggapan Responden Tentang Responsivitas Masyarakat Terhadap Program RUTRWK Di Kecamatan Bantaeng .....	60
18.	Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Program Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng.....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pembangunan diberbagai Negara-negara di Dunia di hadapkan pada masalah lingkungan yang hebat, khususnya terjadinya gejala detereorisasi lingkungan yang serius, baik yang terjadi didaerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Ironisnya, dalam dunia yang didalamnya telah berkembang ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sebetulnya akan membawa perbaikan kehidupan masyarakat, namun justru sebaliknya yang terjadi. Imbas negatif pembangunan yang dilaksanakan telah dirasakan oleh daerah yang bersangkutan dan kemudian menyebar kedaerah lain tanpa ada pemecahan yang efektif, pertumbuhan pesat terutama dikawasan Wilayah Perkotaan, tidak terkecuali perkembangan kota-kota besar di Indonesia. Hal ini tidak terlepas kenyataan bahwa wilayah kota pada umumnya dipandang sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan, pusat pemerintahan dan sebagainya. Akibatnya, adalah terkonsentrasinya jumlah penduduk yang hidup di wilayah kota. (Yunus, 2008:139 ).

Pertambahan penduduk kota baik secara alamiah maupun secara migrasi, tidak hanya menyebabkan wilayah kota menjadi berkembang tetapi juga menuntut tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai guna memenuhi kebutuhan penduduk dengan berbagai macam karakteristik dan kegiatan. Di lain pihak pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan seperti perumahan, jalan, air bersih,

dan sebagainya, belum terpenuhi secara menyeluruh karena terbatasnya daya dukung kemampuan pemerintah wilayah kota untuk membiayai pembangunan berbagai sarana dan prasarana wilayah perkotaan.

Terkonsentrasinya jumlah penduduk yang hidup di wilayah kota saling menimbulkan berbagai masalah perkotaan yang kompleks seperti menurunnya kualitas lingkungan, timbulnya kerawanan sosial, masalah pemukiman kumuh dan sebagainya juga dapat berakibat buruk terhadap perkembangan daerah sekitarnya, sehingga mau tidak mau perencanaan wilayah kota, dalam kaitannya perkembangan wilayah kota menjadi sangat penting artinya terutama untuk mengatasi masalah-masalah wilayah perkotaan yang mungkin lebih berat dimasa mendatang. Selain itu perkembangan wilayah kota yang sedemikian pesatnya memerlukan memerlukan penatan ruang yang serasi diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah perkotaan yang memadai. Semua ini harus dituangkan dalam satu system perencanaan wilayah kota yang menyeluruh dan terpadu. (Yunus, 2008:140-141).

Berhasil tidaknya perencanaan wilayah kota dalam pengimplementasiannya sangat tergantung pada pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan yang telah disusun, antara lain pemerintah daerah, para perencana dan masyarakat itu sendiri. Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, peranan pemerintah dalam perencanaan wilayah kota sangat besar. Pemerintah adalah pihak yang berwenang dengan perencanaan dan perluasan wilayah kota dengan mengikutsertakan masyarakat melalui perwakilannya yaitu lembaga legislatif untuk mengeluarkan kebijaksanaan tentang perencanaan wilayah kota.

Demikian pula halnya dengan wilayah Kota Bantaeng dalam perkembangannya telah memiliki Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng Tahun 2012 – 2032 yaitu memadukan, menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang terkendali dan disusun melalui pendekatan ekonomi, ekologi dan rekayasa dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial

Demikian pula dengan adanya peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 26 Tahun 2007.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng berisi rencana pengembangan tata ruang optimal yang disusun secara menyeluruh dan terpadu, dengan menganalisa segala aspek dan faktor pengembangan kota dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif. Dengan adanya rencana umum tata ruang wilayah kota ini, Pemerintah Kabupaten Bantaeng memiliki rencana pembangunan wilayah kota yang berfungsi sebagai wadah untuk kepentingan pemerintah wilayah kota serta masyarakat dalam implementasi berbagai kegiatan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilyah Kota Bantaeng pada hakekatnya jawaban atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan hasil dari suatu proses perencanaan dengan mengalokasikan pemanfaatan ruang, obyek-obyek fisik dan aktivitas kawasan kota. Proses tersebut meliputi; (1) Pemanfaatan ruang sesuai dengan

peruntukannya untuk sejumlah pusat kawasan pengembangan yang telah ditetapkan, (2) Pembangunan dan penyediaan Fasilitas sarana publik berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatannya, (3) Penyediaan utilitas kota. Perencanaan tata ruang memiliki arti penataan segala sesuatu yang berada didalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Dalam perencanaan tata ruang mencakup proses bagaimana mendistribusikan tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan hidupnya. (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bantaenag 2012 - 2032).

Walaupun RUTRWK Bantaeng telah disahkan sebagai acuan rencana pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat ataupun pemerintah secara luas, tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa diantaranya, implementasi pembangunan menyimpang dari peruntukan RUTRWK dimaksud. Atas ketidaksesuaian antara seharusnya dengan kegiatan dilapangan akan sangat berpengaruh negatif terhadap kelancaran, keterpaduan, kesinambungan dan kualitas pembangunan serta kelestarian alam.

Hal inilah memotivasi penulis mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul : “ Evaluasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng “.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan rencana umum tata ruang wilayah kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ?

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan rencana umum tata ruang wilayah Kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan rencana Umum tata ruang wilayah kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan rencana umum tata ruang wilayah kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

#### 2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai bahan studi perbandingan dan referensi kepada semua pihak yang berminat dalam hal perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan wilayah kota.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam implementasi perencanaan pembangunan wilayah kota kedepan.
- c. Dengan mengungkapkan beberapa alternatif pemecahan masalah, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan atau minimal merupakan informasi yang bermanfaat dalam pengembangan wilayah kota bantaeng. Khususnya mengenai kegunaan penelitian yang telah disebutkan ini yang meliputi 3

aspek, dimana salah satu diantaranya yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan oleh pihak penentu kebijakan perlu menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dalam melakukan evaluasi hasil agar dikaitkan dengan sumber daya (*infut*) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, dana/keuangan, sarana-prasarana, metode kerja dan hal-hal yang berkaitan. Lebih memahami pengertian evaluasi di kemukakan pendapat para pakar ali mengenai defenisi evaluasi antara lain:

Jones (1991:357) dalam Nawawi (2009:155) mengemukakan evaluasi suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan. Ia bervariasi dalam spesifikasi kriteria, dengan uraian dibawah ini:

1. Spesifikasi, merupakan sub kegiatan terpenting. Ia mengacu pada identifikasi tujuan serta kriteria-kriteria tujuan yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau program.
2. Pengukuran (*masurement*), secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan evaluasi.
3. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan.
4. Rekomendasi adalah suatu penentuan atau penemuan mengenai apa yang akan dilanjutkan selanjutnya.

Menurut Lester dan Stewar (2000:126) dalam Agustino (2006:185), evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Muhammad, et al (2001: 2) dalam Nawawi (2009: 156) mengemukakan bahwa evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit, hal ini dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian apa yang dilaporkan dan apa yang dihasilkan, penilaian atas pencapaian hasil, penilaian atas aktivitas, program kebijakan dan keselarasan tujuan dan sasaran dengan misi dan visi organisasi, penilaian akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, penilaian pelaksanaan tugas, penilaian kinerja pegawai penilaian rencana masa depan.

Menurut Dye, (1981), dalam Nawawi (2009:159) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dan kebijakan baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi, untuk mendapat *outcome* dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan, Evaluasi mengandung pengertian: suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Tujuan evaluasi adalah kegiatan atau proses penentuan nilai, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Dalam proses penilaian, dilakukan perbandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil dihimpun dengan kriteria tertentu, untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskan kebijakan tertentu. Kriteria atau tolak ukur yang dipegang tidak lain adalah tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan. (Agustino, 2006: 186 ).

Tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1994), dalam Nawawi (2009:167) yakni (1) evaluasi semu; (2) evaluasi formal; (3) Evaluasi keputusan teoritis. Yang dimaksud dengan evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa

menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai-nilai dari program dan kebijakan. Sedangkan evaluasi proses keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders*. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para *stakeholders*.

Kendala dari evaluasi sering kurang mendapat perhatian, baik dari kalangan implementator maupun *stakeholders* yang lain. Suatu program sering hanya berhenti pada tahap implementasi, tanpa diikuti tahap evaluasi. Berbagai kendala dalam evaluasi yaitu kendala psikologis. Banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang evaluasi menunjukkan kurang baik, jadi akan menghambat karir mereka. Sehingga banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik.

Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan, yang boleh dilakukan atau tidak. Kendala ekonomis kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apa bila tanpa dukungan finansial. Dan kendala teknis evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang *up to date*. Disamping itu, data yang ada kualitasnya kurang baik, karena *supply* data kepada instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhatikan substansinya. Sedangkan kendala politis evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bias jadi saling menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada politik tertentu. Dan kurang tersedianya evaluator. Pada berbagai lembaga pemerintah, kurang tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi. Ini disebabkan karena belum tercipta budaya evaluasi sehingga pemerintah tidak memiliki program yang jelas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibidang evaluasi. Selama ini program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah lebih terfokus pada peningkatan kompetensi dibidang. (Nawawi 2009: 166-167).

## **B. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai akomodasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pengusungan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan

dan pemerataan seringkali berbenturan dengan nilai-nilai birokrasi seperti nilai efektifitas dan pertanggung jawaban kepada lembaga. Partisipasi dan akomodasi kepentingan publik juga seringkali terbentur dengan nilai-nilai prosedural hirarkis birokratis formal yang menyebabkan proses kebijakan seakan-akan berada dalam ruang terbuka akan tetapi sarat dengan muatan birokratis yang memunculkan nilai demokratis. Dye (1995), dalam Agustino (2006:4).

Menurut Anderson (1984: 3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Maka dalam kebijakan publik harus mempunyai penyusunan agenda dan agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.

Kata kebijakan ada yang mengatakan : (Ndraha 2003: 492-499) bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Meski demikian kata kebijakan yang berasal dari *policy* dianggap merupakan konsep yang relatif (Michael Hill, 1993: 8): *The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency.*

Kebijakan dalam Kybernology adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Terkait dengan organisasi, kebijakan menurut Terry dalam bukunya *Principles of Management* adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin (Terry, 1964:278). Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- 1). Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2). Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang - undang.
- 3). Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai defenisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002; 5) memberikan defenisi kebijakan publik secara luas yakni sebagai *whatever governments choose to do or not to do*. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik merupakan pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk

melaksanakan sesuatu maupun untuk tidak melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyamakan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah, dan memandang setiap pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengertian ini menonjolkan kebebasan pemerintah untuk memilih melaksanakan sesuatu dan yang oleh pemerintah dipilih untuk tidak dilakukan.

Senada dengan pendapat di atas, Edward dan Sharkansky (1980:31) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan. Ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. Kemudian ada juga pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok atau dua kutub, yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang diramalkan (*predictable*) atau dapat diantisipasi sebelumnya.

### **C. Konsep Evaluasi Kebijakan publik**

Evaluasi kebijakan pada umumnya ketika kita berbicara mengenai evaluasi kebijakan asosiasi pikiran kita dihubungkan dengan perkiraan atau penaksiran atas kebijakan yang tengah diimplementasikan. Namun sebenarnya tidak hanya itu. Evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi implementasi dan tentu saja efek atau pengaruh kebijakan itu sendiri.

Evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tujuannya dengan kebijakan itu sendiri, para analisis dan perumus kebijakan selalu membuat penilaian melalui pendapat mereka mengenai manfaat atau pengaruh dari kebijakan, program, dan proyek yang tengah dan atau telah dilaksanakan banyak pendapat mengenai evaluasi kebijakan dinyatakan dalam variasi yang mengesankan, baik yang bersifat anekdot dan sepotong-sepotong, dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan partisan, ataupun kriteria penilaian yang lainnya. Namun pada dasarnya ketika seorang hendak melakukan evaluasi kebijakan.

Dalam evaluasi kebijakan akan terlihat apakah kebijakan publik ada hasilnya dan dampak yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Selanjutnya dapat dijadikan dasar apakah suatu kebijakan layak diteruskan,direvisi atau dihentikan sama sekali.(Subarsono, 2008).

Selanjutnya menurut Dunn (1999:608) dalam Agustino (2006:187-189), tentang fungsi evaluasi kebijakan publik ada tiga di jabarkan disini ialah: *Pertama*, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan meliputi : (1) Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. (2) Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsip, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. (3) bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh public sehingga untuk memberikan informasi yang valid dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan bagi warga masyarakat. *Kedua*, Evaluasi kebijakan berfungsi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya, tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok, golongan, partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai. Nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan oleh para *decision maker* perlu dikritik

dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah-masalah yang hendak dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis kebijakan dapat menguji alternatif nilai yang pernah diperhitungkan maupun landasan-;landasan para decision-maker dalam berbagai bentuk rasionalitas. *Ketiga*, Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses evaluasi kebijakan dapat memberi sumbangan bagi reformulasi masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternative kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan alternative kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik.

Evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak, Anderson: (1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart, (2000:126) dalam dalam Agustinos (2006:185) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu:

1. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor apa yang menyebabkannya.
2. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan penilaian apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis dan rekomendasi (Jones: 1984). Spesifikasi meliputi identifikasi tujuan atau kriteria di mana program tersebut akan dievaluasi. Ukuran atau kriteria ini yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Rekomendasi yakni penentuan tentang apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Disisi lain Nugroho (2006) mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.

2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Keberhasilan sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggaakan akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bis dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (1994) dalam Nawawi (2009:169) mencakup lima indikator, yaitu (1) Efektifitas, apakah hasil organisasi yang diinginkan tercapai (2) Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. (3) Pemerataan, apakah manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda. (4) Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat hasil preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka (5) Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

#### **D. Konsep Kelembagaan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Kota**

Mengelola tata ruang wilayah kota berarti menghadapi berbagai persoalan dan melibatkan berbagai pihak. Dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang wilayah kota menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses

dalam proses perencanaan tersebut. Landasan penataan wilayah di Indonesia adalah undang-undang penataan ruang (UUPR) No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Tarigan, 2009:58).

Kelemahan institusional yang sering dijumpai dalam pengelolaan kota dan wilayah antara lain sebagai berikut:

1. Institusi yang ada tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsinya yang terkait dengan pengelolaan kota dan wilayah.
2. Institusi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tertentu belum ada.
3. Konflik kepentingan antar institusi.
4. Kurang koordinasi atau kerja sama antar institusi dan antar daerah.
5. Distribusi wewenang dan tanggung jawab tidak jelas.

Kelemahan-kelemahan tersebut ditunjukkan adanya masalah kelembagaan wilayah kota antara lain sebagai berikut:

1. Belum efektifnya TKPRD (Tim koordinasi penataan ruang daerah) Propinsi dan kabupaten kota.

TKPRD yang terdapat di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota selama ini baru berfungsi pada aspek penyusunan rencana tata ruang kota, itupun belum di semua daerah aktif berperan. Sedangkan pada dua aspek yang lain dari penataan ruang, yaitu aspek pemanfaatan ruang dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang belum tampak peranan TKPRD. Peranan

secara aktif dari TKPRD tersebut tidak mutlak diperlukan sejak dari tahap awal, yaitu penyusunan perencanaan, pemanfaatan ruang, sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Kelemahan TKPRD saat ini adalah belum bakunya prosedur kerja, keterbatasan SDM dalam melaksanakan kewenangan dari tim tersebut didalam tugasnya sehari-hari.

## 2. Partisipasi Masyarakat Masih Kurang.

Kenyataannya, peran serta masyarakat belum diefektifkannya dalam setiap tahapan penyusunan rencana tata ruang sampai pada pelaksanaan/penerapan dilapangan. Konsep *participatory planning* perlu diterapkan didalam system perencanaan saat ini.

## 3. Kurang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Kota.

Koordinasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang baik secara instansional maupun dengan lembaga masyarakat belum berjalan secara baik. Disamping itu, antar lembaga/instansi pemerintah yang melakukan pengendalian kadang-kadang juga terjadi konflik dan tidak sejalan didalam pengendalian pemanfaatan ruang. Misalnya, pada daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai jalur hijau atau pada pendudukan tanah secara liar (*squatters*), selain lemahnya koordinasi interen, koordinasi antardaerah juga perlu diperhatikan. Seiring dengan otonomi daerah muncul adanya egoisme antardaerah muncul adanya egoisme antardaerah dalam mengembangkan wilayahnya misalnya:

- a). Pembatasan migrasi masuk,
- b). Diskriminasi asal daerah dalam penyerapan tenaga kerja
- c). Penelantaran akses jalan ke daerah lain dibelakangnya,
- d). Egoisme dalam pengelolaan sumber daya yang berdampak negative pada daerah lain; contohnya pencemaran di hulu sungai berdampak pada daerah hilir, pembukaan tanah di daerah hulu menyebabkan banjir didaerah hilir, dan konflik memperebutkan wilayah penangkapan ikan diperairan umum. Akibat adanya egoisme antardaerah maka menimbulkan bagi para pihak sehingga yang diharapkan adalah adanya kerjasama antardaerah.

4. Lemah atau Kurangnya Wadah/Lembaga untuk Menampung Aspirasi Masyarakat.

Keberhasilan tata ruang wilayah kota terutama dari tahap penyusunan sampai dengan tahap pengendalian pemanfaatan ruang perlu dibentuk wadah/lembaga untuk menampung aspirasi masyarakat. Wadah atau lembaga tersebut antarlain dapat berupa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menghususkn diri bergerak dibidang penataan ruang kota. Sedangkan lembaga-lembaga masyarakat yang ada masih belum berfungsi didalam partisipasi pengelolaan wilayah kota.

5. Belum Populernya Sistem Informasi Pengelolaan Wilayah Kota.

Di setiap penataan ruang (Penyusunan rencana, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang) perlu dukungan system informasi yang berkaitan dengan dinamika penggunaan ruang di lapangan. System tersebut

mencakup penyajian informasi mengenai data dan peta wilayah kota, prosedur kerja, perkembangan pemanfaatan ruang, penyediaan ruang, dan sebagainya. (Sadyohutomo, 2008:72-73).

#### **E. Konsep dan Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota**

Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan wilayah kota itu berisikan arahan wilayah kota, maka penentuan dan pemanfaatan ruang wilayah kota harus diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan, sehingga dapat memberikan kepastian baik kepada administrasi Negara maupun kepada warga masyarakat. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng mengemukakan bahwa Rencana Umum Ruang Wilayah Kota itu berisi:

1. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
2. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian yang ramah lingkungan;

4. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, berhasil guna terpaduan ramah lingkungan; pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
5. Perwujudan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota disusun berdasarkan pada keserasian pembangunan dengan peruntukan ruang yang ada dengan fungsinya masing-masing. Pada dasarnya rencana umum tata ruang wilayah kota merupakan suatu perencanaan pengembangan jangka panjang yang disusun dalam batasan-batasan kekuasaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah wilayah kota atau pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu RUTRWK merupakan rumusan kebangunan wilayah kota secara internal sebagai dasar bagi penyusunan program-program pembangunan wilayah kota lintas sektoral, dan daerah dalam jangka panjang didalam batas wilayah administrasi kota yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam RUTRWK Bantaeng disebutkan bahwa yang dimaksud dengan RUTRWK atau Rencana Induk Wilayah Kota (RIWK) adalah:

1. Suatu rencana pembangunan wilayah kota yang berisikan rencana pembangunan sektoral dan rencana pengembangan tata ruang yang optimal

yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa segala aspek dan faktor pengembangan wilayah kota dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif.

2. Merupakan kebijaksanaan pengembangan tata ruang fisik wilayah kota yang bersifat dua dimensi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dan rencana jangka panjang wilayah kota, daerah yang bersangkutan.
3. Merupakan pencerminan strategi pengembangan wilayah kota dalam kurun waktu 20 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali yang sejalan pula dengan pelaksanaan pembangunan 5 tahun.

#### **F. Konsep Dasar Penyusunan RUTRWK/RIWK**

Konsep dasar penyusunan pengembangan wilayah kota atau rencana induk wilayah kota berdasarkan buku Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng, terdiri atas:

1. Dalam penyusunan RUTRWK pada prinsipnya harus mempertimbangkan tiga aspek pokok yakni aspek strategis, aspek teknik, dan aspek pengelolaan. Ketiga aspek sebenarnya sangat menentukan didalam menetapkan kebijaksanaan dasar pengembangan wilayah kota.
2. Di dalam penyusunan RUTRWK/RIWK perlu rumusan kebijaksanaan pengembangan kota dengan mempertimbangkan azas manfaat, pemerataan, keseimbangan dan pertumbuhan serta lestari sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah kota itu sendiri maupun hubungan antara kota itu dengan daerah sekitarnya.

3. Kebijakan dasar perencanaan harus dirumuskan berdasarkan tipe kemampuan tumbuh dan berkembangnya kota serta pola watak kota itu sendiri.

#### **G. Konsep Sasaran RUTRWK/RIWK**

Adapun tujuan dan sasaran rencana umum tata ruang wilayah kota seperi yang tercantum dalam buku RUTRWK Bantaeng adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah kota mempunyai rencana pembangunan kota jangka panjang dan dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah serta masyarakat yang bersangkutan.
2. Untuk mencapai maksud tersebut di atas maka RIWK harus berisikan rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana-rencana sektoral dan daerah yang terdapat atau yang akan dialokasikan di wilayah perencanaan. Selanjutnya RIWK yang disusun harus mampu menjawab masalah dan tuntutan pembangunan kota serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.
3. Rencana umum tata ruang wilayah kota disusun dengan tujuan dapat merangsang dan meningkatkan kemampuan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup perkotaan.

#### **H. Kerangka Konseptual**

Implementasi pembangunan suatu wilayah kota, perencanaan umum tata ruang wilayah kota sangat penting artinya Evaluasi kinerja sebagai suatu proses upan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas di masa akan datang,

karena hal ini merupakan landasan bagi terciptanya pembangunan wilayah kota yang serasi dan seimbang diberbagai bidang kehidupan masyarakat .

Pelaksanaan rencana umum tata ruang wilayah kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dapat dilihat dari 3 aspek yaitu:

1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya untuk sejumlah pusat kawasan pengembangan yang telah ditetapkan.
2. Pembangunan dan penyediaan Fasilitas sarana publik berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatannya.
3. Penyediaan utilitas kota

Perencanaan kota mengharuskan kita terutama pemerintah daerah agar peka dan tanggap dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi situasi sedang dan akan terjadi. Evaluasi menunjukkan capaian kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis evaluasi yang dilakukan harus merujuk pada kinerja yang telah di tetapkan, baik itu *infut, proses, outuput, autcome dan impactnya*. Dengan cara ini kita dapat memeilih prioritas langkah penanganan yang sesuai dan efektif terhadap penataan ruang untuk peningkatan kualitas pembangunan termasuk kelestarian sumber daya alam.

Keberhasilan pembangunan wilyah kota maka kita dapat melihat bagaimana Evaluasi kebijakan yang telah dimplementasikan apakah sesuai dengan yang direncanakan atau sebaliknya.Dengan semakin meningkatnya perkembangan

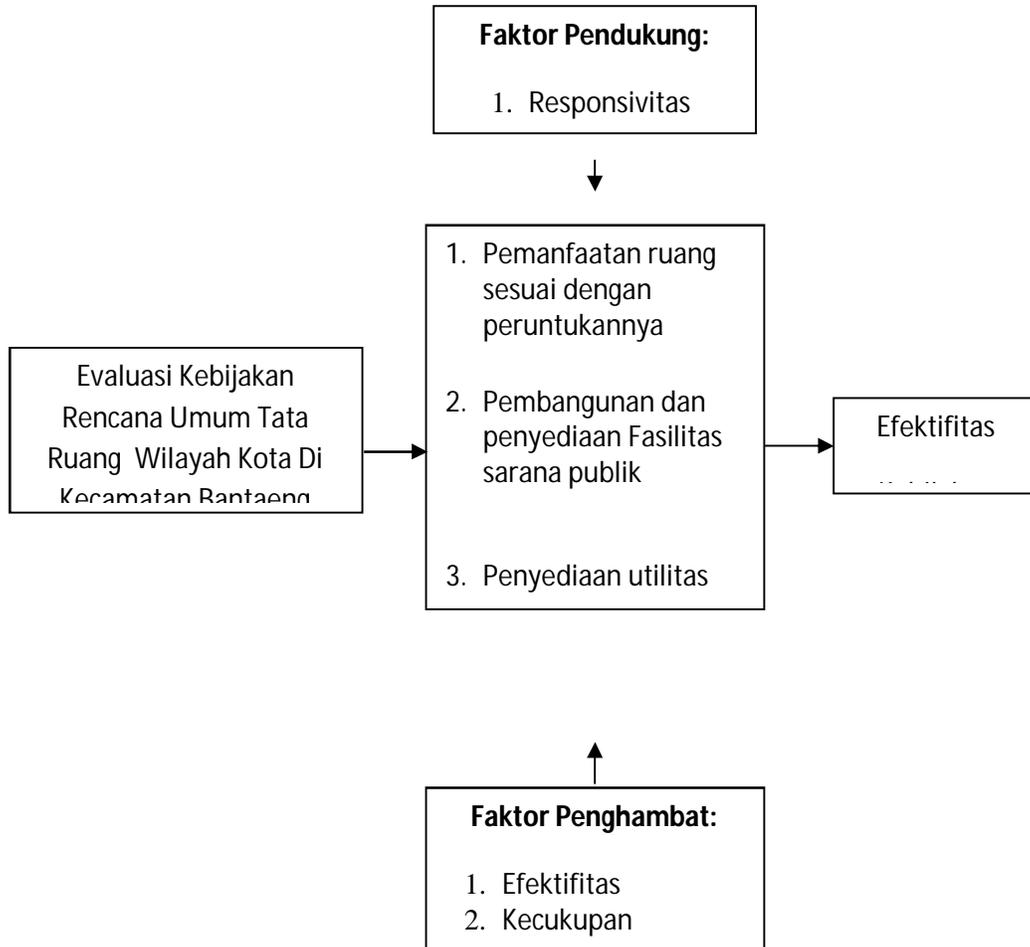
pembangunan khususnya diwilayah perkotaan, keberadaan RUTRWK sangat diperlukan dan menentukan dalam rangka mengakomodir dan mensinkronkan berbagai sektor pembangunan serta menghindari benturan kepentingan satu dan lainnya.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang ditemukan, menggambarkan bahwa implementasi RUTRWK kota Bantaeng yang telah ditetapkan, belum optimal dapat direalisasikan. Terlihat penempatan beberapa bangunan berada disuatu lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan itu sanagat memerlukan Evaluasi Kebijakan untuk penataan Ruang yang lebih efektif untuk masa yang akan datang.

Adanya perbedaan dari yang direncanakan, walaupun dari jumlahnya masih relatif kecil tetapi akan menghambat kepentingan dan keberhasilan pembangunan dengan skopnya jauh lebih besar. Dengan demikian akan menimbulkan kerawanan yang dapat merugikan pada masyarakat dan pemerintah sendiri.

Berkaitan dengan hal Pelaksanaannya, maka hal-hal yang ingin diketahui adalah tentang pelaksanaan kebijakan dan faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, setelah yang mempengaruhi telah ditetapkan. Maka akan dideskripsikan mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilyah Kota di Kecamatan Bantaeng . Untuk lebih mempermudah uraian tersebut diats maka dapat digambarkan sebagai berikut:

## BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL



### I. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini yaitu;

Bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan RUTRWK Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Dilihat dari tiga (3) aspek pembangunan yaitu;

- a. Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
- b. Pembangunan dan penyediaan Fasilitas sarana public

c. Penyediaan utilitas kota

2. Deskripsi fokusnya yaitu;

a. Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya untuk sejumlah pusat kawasan pengembangan yang telah ditetapkan seperti : (1) Kawasan industry (2) Kawasan Perumahan (3) Kawasan perdagangan, dan (4) Kawasan terminal.

b. Pembangunan dan penyediaan Fasilitas sarana publik berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatannya. (1) Pembangunan fasilitas pemerintahan (2) Pembangunan fasilitas pendidikan (3) Pembangunan fasilitas kesehatan, dan (4) Pembangunan fasilitas peribadatan.

c. Penyediaan utilitas kota sebagai sarana yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dan dibutuhkan seperti : (1) Penyediaan Air Minum (air bersih), dan (2) Listrik.

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan RUTRWK Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bantaeng yang merupakan wilayah Kota Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bantaeng telah memiliki RUTRWK yang telah disahkan dalam bentuk peraturan daerah tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa diantaranya menyimpang dari RUTRWK yang dimaksud. Penelitian ini di laksanakan selam 2 bulan mulai bulan mei sampai bulan juni 2014.

##### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah survey yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

###### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif digabung dengan tipe penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah yang diteliti yaitu: Bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan RUTRWK Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Dilihat dari tiga (3) aspek pembagunan.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari dua sumber yaitu:

#### 1. Data Primer

Data yang akan diperoleh langsung dari informan pengumpulan data berupa wawancara, serta melakukan pengamatan langsung terhadap penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen-dokumen arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim diwilayah dalam ibu kota Kabupaten Bantaeng yang mencakup 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu:

- BWK I Kelurahan Pallantikang
- BWK II Kelurahan Tappanjeng
- BWK III Kelurahan Lembang
- BWK IV Kelurahan Malilingi

#### 2. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah ditentukan secara Purposive Sampling atau bertujuan dimana peneliti memilih informan atau responden

secara sengaja, yaitu mereka yang dianggap berkompeten atau dianggap tahu pasti tentang pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang kota:

a. Responden

Responden terdiri dari tokoh masyarakat di 4 Kelurahan yang menjadi wilayah pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota (RUTRWK) Bantaeng Kecamatan Bantaeng:

BWK Pallantikang	=	5 Orang.
BWK Tappanjeng	=	5 Orang.
BWK Lembang	=	5 Orang.
<u>BWK Malilingi</u>	=	<u>5 Orang</u>
Jumlah	=	20 Orang

b. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini penulis menetapkan informan kunci di ambil dari lembaga/instansi pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun informan yang sudah ditetapkan adalah:

1. Bappeda Kabupaten Bantaeng.	: 1 Orang
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng.	: 1 Orang
3. Kepala Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng	: 1 Orang.
4. Camat Bantaeng.	: 1 Orang
5. Lurah Pallantikang.	: 1 Orang
6. Lurah Lembang.	: 1 Orang
7. <u>Masyarakat</u>	<u>: 3 Orang</u>
Jumlah	: 9 Orang

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan antara lain:

### 1. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan untuk mengetahui secara konseptual tentang permasalahan yang diteliti dengan membaca literature khususnya yang berhubungan dengan tata ruang.

### 2. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan cara mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan masalah evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana umum tata ruang wilayah kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

### 3. Wawancara

Wawancara atau Interview merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan beberapa Informan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan.

### 4. Kuesioner

Kuesioner , merupakan tehnik pengumpulan data yang berisi rangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden

### 5. Dokumentasi

Cara menelaah dokumen melalui kajian literature dan undang-undang, dokumen, surat-surat keputusan majalah dan surat kabar yang berkaitan

dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana umum tata ruang wilayah kota.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelolah data adalah teknik analisis data hasil observasi, wawancara dan kuesioner, setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data dengan menggunakan tabel frekwensi kemudian di deskripsikan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Bantaeng terletak + 120 Km<sup>2</sup> arah selatan Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan), dengan posisi geografis antara 5021'13"-5035'26' LS dan 119051 '42"-120050'27" BT, Wilayahnya mulai dari tepi Laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang tercatat memiliki luas sekitar 395,83 Km<sup>2</sup> (39.583 Ha), dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 7.253 Ha (18,32%) dan lahan kering 32.330 Ha (81,68%) dan garis pantai sepanjang 21,50 Km. Batas-batas daerahnya meliputi Kabupaten Gowa dan Bulukumba di sebelah utara, Laut Flores di sebelah selatan, Kabupaten Bulukumba di sebelah timur, serta Kabupaten Jeneponto di sebelah barat.

Kota Bantaeng adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banteng, Sulawesi Selatan. Ibukota Kecamatan Bantaeng terletak di Kelurahan Pallantikang, Luas wilayah Kabupaten Bantaeng tercatat 28,85 Km<sup>2</sup> atau 7,29% dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng, Secara administratif:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karangtuang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Malilingi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tappanjeng.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bissappu.

Kecamatan Bantaeng terdiri dari 8 Kelurahan dan 1 Desa yang terdiri dari:

1. Kelurahan Tappanjeng : 0,82 Km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Pallantikang : 0,93 Km<sup>2</sup>
3. Kelurahan Letta : 0,79 Km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Mallilingi : 0,84 Km<sup>2</sup>
5. Kelurahan Lembang : 2,97 Km<sup>2</sup>
6. Kelurahan Lamalaka : 2,00 Km<sup>2</sup>
7. Kelurahan Karatuang : 7,07 Km<sup>2</sup>
8. Kelurahan Onto : 4,69 Km<sup>2</sup>
9. Desa Kayu Loe : 8,74 Km<sup>2</sup>

Dari 8 Kelurahan dan 1 Desa di atas, 6 diantaranya yakni Kelurahan Pallantikang, Kelurahan Tappanjeng, Kelurahan Malilingi, Kelurahan Lamalaka, Kelurahan Lembang dan Letta telah ditetapkan sebagai wilayah Kota Bantaeng, dan telah memiliki Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng.

## **2. Kependudukan**

Keadaan mengenai kependudukan sangat penting untuk diketahui, karena merupakan salah satu pertimbangan utama dalam pelayanan rencana, misalnya jumlah dan tingkat pertumbuhan, distribusi, penduduk, dan lain-lain, Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk dapat dilihat pada table 1 berikut:

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa / Kelurahan Di Kecamatan Bantaeng Tahun 2014**

DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH		RATA-RATA	
		RUMAH TANGGA	PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK PER KM	ANGGOTA RUMAH TANGGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tappanjeng	0,82	883	4.110	5.012	5
2. Pallantikang	0,93	1.538	7.003	7.530	4
3. Letta	0,79	598	2.200	2.785	4
4. Mallilingi	0,84	882	3.830	4.560	4
5. Lembang	2,97	1.011	4.342	1.462	4
6. Lamalaka	2,00	971	4.257	2.128	4
7. Karatuang	7,07	571	2.454	347	4
8. Onto	4,69	935	4.043	862	4
9. Kayuloe	8,74	355	1.685	193	5
2013	28,85	7.744	33.924	1.176	4
2012	28,85	7.672	33.561	1.163	4
JUMLAH 2011	28,85	7.272	32.792	2.222	4
2010	28,85	7.239	32.691	2.214	4
2009	28,85	7.208	32.464	1.125	4

*Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Bantaeng, 2014*

Menegenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat di perinci per Desa/Kelurahan di Kota Bantaeng Dapat dilihat komposisinya pada table 2 dibawah ini:

**Tabel 2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantaeng Tahun 2014 .**

<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>RASIO JENIS KELAMIN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tappanjeng	2.048	2.062	4.110	99,32
2. Pallantikang	3.424	3.579	7.003	95,67
3. Letta	1.088	1.112	2.200	97,84
4. Mallilingi	1.887	1.943	3.830	97,12
5. Lembang	2.179	2.163	4.342	100,74
6. Lamalaka	2.067	2.190	4.257	94,38
7. Karatuang	1.232	1.222	2.454	100,82
8. Onto	2.026	2.017	4.043	100,45
9. Kayuloe	826	859	1.685	91,16
2013	16.777	17.147	33.924	97,84
2012	16.524	17.037	33.561	96,97
JUMLAH 2011	16.022	16.770	32.792	95,56
2010	15.977	16.714	32.691	95,59
2009	15.809	16.655	32.464	94,92

*Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Bantaeng.2014*

Adapun keadaan Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bantaeng dapat kita lihat pada tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3: Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bantaeng Tahun 2010 - 2013**

DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK				LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tappanjeng	3.953	3.961	4.070	4.110	0,98
2. Pallantikang	6.929	6.939	6.963	7.003	0,57
3. Letta	2.142	2.146	2.160	2.200	1,85
4. Mallilingi	3.691	3.708	3.790	3.830	1,05
5. Lembang	3.870	3.882	4.302	4.342	0,93
6. Lamalaka	4.202	4.217	4.217	4.257	0,95
7. Karatuang	2.138	2.143	2.414	2.454	1,66
8. Onto	4.241	4.256	4.000	4.043	1,07
9. Kayuloe	1.525	1.540	1.645	1.685	2,43
<b>JUMLAH</b>	<b>32.691</b>	<b>32.792</b>	<b>33.561</b>	<b>33.924</b>	<b>1,11</b>

*Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Bantaeng, 2014*

### **3. Struktur Ekonomi dan Tingkat Pendapatan Masyarakat**

Dilihat dari struktur ekonomi, masyarakat di kota Bantaeng lebih dominan oleh kegiatan ekonomi sekunder dan tersier. Hal ini dicirikan dengan adanya kegiatan perdagangan yang berskala regional dan lokal, antara lain pertokoan, dan pasar untuk kegiatan hasil olahan industri dan usaha jasa terdiri dari jasa konstruksi, pertukangan, transportasi, jasa keahlian, perhotelan, jasa pelayanan sosial, pemerintahan dan sebagainya.

Sektor perekonomian sekunder dan tersier ini memberikan masukan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah perkotaan. Prasarana kegiatan perdagangan berupa pasar, mini market, toko dan kios sebagai besar terkonsentrasi di kelurahan Pallantikang dan Kelurahan tapanjeng.

Tingkat pendapatan masyarakat berdasarkan hasil survey di Kecamatan Bantaeng bahwa jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan di atas Rp .500.000,- sebanyak 35%, yang mempunyai penghasilan antara Rp .100.00,- Rp .700.000,- sebanyak 45%, serta penduduk yang mempunyai penghasilan dibawah Rp 1.000.000,- adalah sebanyak 20%. Berdasarkan hasil survey diatas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kota Bantaeng masih tergolong sedang dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga kebutuhan lainnya.

## **B. Pelaksanaan Kebijakan Program Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Di Kecamatan Bantaeng**

Menilai pelaksanaan kebijakan rencana umum tata ruang wilayah kota di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dapat dilihat dari 3 aspek yaitu:

1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya untuk sejumlah pusat kawasan pengembangan yang telah ditetapkan.
2. Pembangunan dan penyediaan Fasilitas sarana publik berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatannya.
3. Penyediaan utilitas kota.

Pemanfaatan ruang kota berdasarkan peruntukannya yang tercantum dalam dokumen RUTRWK Bantaeng, ketepatan hasil plotting peruntukan lahan kota bantaeng dapat diketahui dengan kegiatan survey lapangan dengan mencocokkan antara peta perencanaan pemanfaatan ruang/lahan kota dengan kondisi/kenyataan pemanfaatan ruang/lahan yang terlihat dilapangan. Sedangkan mengenai pembangunan dan penempatan berbagai fasilitas kota berdasarkan kebutuhan masyarakat serta tingkat kesesuaian dengan pelaksanaan aktivitasnya dapat diketahui dengan mempelajari jawaban responden, demikian pula dengan peyediaan utilitas kota yang ada.

Adapun pelaksanaan kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ialah sebagai berikut:

### **1. Pemanfaatan Ruang Wilayah Berdasarkan Peruntukannya**

Berdasarkan hasil survey dan observasi terhadap pelaksanaan RUTRWK yang ada, dengan membandingkan antara rencana peruntukan lahan dengan kenyataan pemanfaatannya ternyata pada bagian-bagian tertentu telah cukup sesuai dengan rencana tata ruang, namun pada bagian-bagian lain terdapat sejumlah penyimpangan atau pergeseran dari RUTRWK yang ada.

Pemanfaatan ruang/lahan dalam peruntukan kegiatan fasilitas secara garis besar yang mengalami pergeseran atau penyimpangan dari RUTRWK yang telah ada ialah sebagai berikut:

#### **a. Kawasan Industri**

Menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng, lahan yang disediakan untuk kawasan

industri ialah di Kelurahan Letta, untuk industri pengolahan, industri Jagung, Air Minum Vita Pengawetan Ikan, dan Industri Perabot Rumah Tangga.

Dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan, hal ini terlihat dari adanya pergeseran lokasi kawasan industri jagung, dan air minum vita yang seharusnya di Letta ternyata berkembang dan diberikan kesempatan membangun pabrik pemipil jagung di Kelurahan Lamalaka, dan pabrik Air Minum Vita di Kelurahan Malilingi. Saat ini kelurahan lamalaka dan kelurahan malilingi terdapat 2 (dua) buah pabrik industri jagung dan air minum vita dengan kapasitas yang cukup besar.

Berdasarkan jawaban informan, yakni kepala kantor pengendalian tata ruang wilayah kota, pergeseran peruntukan lokasi industri diberikan toleransi karena bahan baku untuk pabrik pemipil jagung dan pabrik air minum vita, justru lebih mudah diperoleh oleh pihak Investor jika terletak di Kelurahan Lamalaka dan Malilingi dibandingkan dengan di Letta.

b. Kawasan Perumahan

Kelurahan Pallantikang diperuntukkan bagi pengembangan perumahan, namun dalam perakteknya sebagian dari kawasan tersebut dialokasikan untuk pengembangan industri kota, dengan alasan letaknya atrategis yakni pada poros jalan Jenepono- Bulukumba.

Kawasan perumahan justru saat ini berkembang di Kelurahan Malilingi dan Tappanjeng. Dari 3 (tiga) kompleks perumahan baru yang ada saat ini,

tak satu pun yang memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya di Pallantikang, namun 2 pengembang membangun di Malilingi dan 1 pengembang membangun di Tappanjeng.

c. Kawasan Perdagangan

Menurut RUTRWK Kota Bantaeng, perdagangan regional dipusatkan di Kelurahan Lembang, namun pengembangan kawasan pusat perdagangan ternyata semakin dikembangkan di Kelurahan Tappanjeng dan Kelurahan Letta. Pusat perbelanjaan dalam bentuk Rumah Toko (Ruko) dan toko berada di Kelurahan Tappanjeng sementara pasar sentral baru terletak di Kelurahan Letta.

Menurut penjabaran informan, dalam hal ini Ketua Bappeda Bantaeng, pergeseran pemanfaatan lahan/ ruang tersebut karena pada lokasi yang ada saat ini telah ada cikal bakal pasar dan pemda belum dapat mengembangkan di lokasi berdasarkan RUTRWK karena mahal biaya untuk pembebasan tanah, serta pembangunan infrastruktur perdagangan regional.

d. Kawasan Terminal

Berdasarkan RUTRWK, kawasan terminal dialokasikan di Kelurahan Pallantikang, yakni di sekitar JL. Elang dan JL. Kakat tua, dengan tetap mempertimbangkan kemudahan bagi pengguna terminal, baik untuk menuju pusat keramaian, maupun menuju luar Kabupaten Bantaeng. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata bahwa terminal Be'lang, dibangun di Wilayah Kelurahan Tappanjeng di sekitar atau berbatasan

kawasan Kecamatan Bissappu. Hal ini berakibat, tidak efektifnya penggunaan terminal baik bagi angkutan umum maupun bagi penumpang.

Pengembangan kawasan tertentu yang tidak sesuai dengan RUTRWK kota Bantaeng seperti disebut diatas, pada hakekatnya merupakan bentuk ketidakkonsistenan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng. Hal ini dapat berdampak buruk bagi wajah kota Bantaeng di masa depan.

Adanya pergeseran dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pada empat jenis kawasan di atas, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota, khususnya dalam pemanfaatan lahan berdasarkan peruntukannya, belum dapat dikatakan baik.

## **2. Pembangunan Fasilitas**

Dalam dokumen RUTRWK Bantaeng, juga telah ditetapkan arah dan rencana pembangunan fasilitas umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana strategis yang ada. Adapun mengenai pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota, ditinjau dari pembangunan fasilitas umum Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan adalah sebagai berikut:

### **a. Pemerintahan**

Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota khususnya pembangunan fasilitas pemerintahan di kota Banateng diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, efisien, dan efektif yang didukung

oleh kemudahan dalam mencapainya dan berbagai sudut kota, sekaligus mendukung dan memperlancar segala aktivitas warga kota dalam memenuhi kebutuhannya.

Untuk mengetahui mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan fasilitas pemerintahan, ketepatan pemanfaatan lokasi yang sesuai dan kondisi kebutuhan masyarakat, maka dapat diketahui melalui penilaian responden terhadap pembangunan fasilitas pemerintahan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4 : Tanggapan Respoden Tentang Kebutuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Pemerintahan Di Kota Bantaeng.**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Mencukupi	4	20
Mencukupi	9	45
Kurang Mencukupi	5	25
Tidak Mencukupi	2	10
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Pada tabel 4 di atas, dapat dilihat penilaian responden tentang Kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan di Kecamatan Bantaeng, yang mana menunjukkan bahwa 4 orang respoden menilai dengan persentase 20% yang menyatakan Sangat mencukupi, sebanyak 9 orang atau 45% yang menyatakan Mencukupi, ada 5 orang atau 25 % yang menyatakan Kurang mencukupi, bahkan ada juga 2 orang responden atau 10% yang menyatakan tidak mencukupi.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh kepala lurah pallantikang di kecamatan bantaeng dalam wawancara penulis bahwa:

Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pemerintahan di Kota Bantaeng ini dapat dikatakan sudah mencukupi, dilihat dari tersediannya fasilitas pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya hal ini membuktikan bahwa pemerintah sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya meskipun tidak sempurna dari apa yang kita inginkan, (Wawancara, MB Mei, 2014).

Selanjutnya pemanfaatan ruang kota bantaeng, untuk mengetahui tanggapan responden tentang pemanfaatan ruang untuk penempatan fasilitas pemerintahan di kota Bantaeng dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 5: Penilaian Responden Tentang Pemanfaatan Ruang Untuk Penempatan Fasilitas Pemerintahan Di Kota Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Sesuai	4	20
Sesuai	10	50
Kurang Sesuai	4	20
Tidak Sesuai	2	10
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa penilaian responden tentang pemanfaatan ruang untuk penempatan fasilitas pemerintahan di kecamatan bantaeng, adalah terdapat 4 responden yang menilai sangat sesuai, dengan persentase 20%, 10 responden yang menilai sesuai dengan persentase 50%, dan 4 responden yang menilai kurang sesuai dengan persentase 20%, serta 2 responden dengan persentase 10% yang menyatakan tidak sesuai.

Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bantaeng mengenai pemanfaatan ruang penempatan fasilitas pemerintah pada wawancara penulis bahwa:

Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas pemerintahan dalam melayani sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat tentu kami sebagai wakil rakyat merespon pemerintah dalam hal penempatan fasilitas pemerintahan ditempatkan di tengah-tengah kota agar dapat mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat, (Wawancara, AR Mei, 2014)

#### **b. Pendidikan**

Pembangunan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan yang dijiwai oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan pendidikan harus merata diseluruh daerah dan golongan masyarakat semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka kualitas penduduk akan semakin tinggi pula.

Lembaga pendidikan di kota bantaeng sampai sekarang ini cukuplah lengkap, hal ini tampak dari tersedianya lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, hal ini sangat dirasakan pengaruhnya terhadap pembinaan warga kota. Mengenai jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia di kota bantaeng.

Untuk mengetahui bagaimana penilaian responden tentang pemenuhan sarana pendidikan di kota Bantaeng dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6: Penilaian Responden Tentang Kebutuhan Sarana dan Prasarana pendidikan di Kecamatan Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Mencukupi	4	20
Mencukupi	11	55
Kurang Mencukupi	5	25
Tidak Mencukupi	-	-
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Dari tabel tersebut memperlihatkan persentase penilaian responden tentang kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan di Kecamatan Bantaeng, yang mana 4 responden dengan persentase 20% menilai sangat mencukupi, 11 responden dengan persentase 55% menilai mencukupi dan 5 responden dengan persentase 25% menilai kurang mencukupi serta tidak ada responden yang menilai tidak mencukupi, jika melihat persentase keseluruhan, maka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di kota Bantaeng dapat dikatakan mencukupi kebutuhan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Pansus DPRD Kabupaten Bantaeng di peroleh informasi bahwa:

Terselenggaranya pendidikan yang memadai Bagi masyarakat dimana sarana dan prasarannya merupakan modal pokok yang harus disediakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan, meski lembaga pendidikan di kota bantaeng sekarang cukup lengkap,tapi masih sangat perlu untuk di kembangkan kuantitas dan kualitasnya agar mampu bersaing dengan daerah-daerah lain ini adalah tugas kita bersama

kedepan dalam peningkatan di wilayah pendidikan terutama pemerintah.(Wawancara, HS, Juni, 2014)

Mengenai penempatan fasilitas pendidikan di kota Bantaeng menurut penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7: Tanggapan Responden Tentang Penempatan Fasilitas Pendidikan di Kota Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Strategis	5	25
Strategis	9	45
Kurang Strategis	6	30
Tidak Strategis	-	-
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Tabel di atas memperlihatkan penilaian responden terhadap penempatan fasilitas pendidikan di kota bantaeng yang mana ada 5 responden dengan persentase 25% yang menilai sangat strategis, 9 responden dengan persentase 45% yang menilai strategis, 6 responden dengan persentase 30% yang menilai kurang strategis, dan tidak ada responden yang menilai tidak strategis. Ini berarti bahwa penempatan fasilitas pendidikan di kota Bantaeng secara keseluruhan dapat dinilai strategis dengan hasil persentase yang ada, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang staf pegawai kantor dinas tata ruang wilayah kota Kabupaten Bantaeng sebagai informan dalam wawancara penulis bahwa:

Dalam pedoman RUTRWK Bantaeng di atur bahwa penempatan fasilitas pendidikan dasar (TK, SD) lokasinya sebaiknya di tengah-tengah kelompok perumahan yang radius pelayanannya tidak lebih 1000 meter, dan digabung dengan tempat bermain dan berolahraga serta diharapkan jauh dari keramaian seperti pasar dan terminal, sedangkan untuk pendidikan menengah (SLTP, SMU) lokasinya sebaiknya sama atau digabung dalam satu kompleks.(Wawancara, YS, Juni, 2014).

### c. Kesehatan

Penyediaan fasilitas kesehatan ini ditujukan untuk pemberian pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan yang meliputi pencegahan, penyembuhan dalam bidang Keluarga Berencana (KB).

Untuk mengetahui penilaian responden mengenai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di kota Bantaeng dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 8: Tanggapan Responden Tentang Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Bantaeng.**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Mencukupi	2	10
Mencukupi	11	55
Kurang Mencukupi	7	35
Tidak Mencukupi	-	-
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Dari tabel di atas menunjukkan, 2 responden menilai sangat mencukupi dengan persentase 10%, 11 responden menilai mencukupi dengan persentase 55%, 7 responden

menilai tidak mencukupi atau sekitar 35%, dan tidak ada responden yang menilai tidak mencukupi tentang sarana dan prasarana kesehatan, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan untuk masyarakat Kota Bantaeng sangat mencukupi.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Camat Bantaeng Tentang sarana dan prasarana kesehatan pada wawancara penulis bahwa:

Mengenai fasilitas Kesehatan, fasilitas yang sangat besar peranannya dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng yang perlu terus ditingkatkan baik kualitas sarana pendukungnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Pemerintah juga dalam rangkai lebih meningkatkan pelayanan kesehatan menempuh langkah dengan pengadaan tenaga-tenaga kesehatan sesuai kebutuhan. (Wawancara, HS, Juni, 2014)

Berikut tanggapan responden mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan fasilitas kesehatan di kecamatan bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9: Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Ruang Untuk Penempatan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Sesuai	5	25
Sesuai	9	45
Kurang Sesuai	6	30
Tidak Sesuai	-	-
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Berdasarkan penilaian persentase di atas, dimana 5 responden atau 25% menilai sangat sesuai, 9 responden atau 45% menilai sesuai, dan 6 responden menilai kurang sesuai dengan persentase 30%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pemanfaatan ruang untuk penempatan fasilitas kesehatan sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kecamatan Bantaeng.

Senada dengan hal tersebut, staf Bappeda AR dalam wawancara penulis mengatakan bahwa:

Pemda bantaeng telah mengambil kebijaksanaan dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seuruh lapisan masarakat melalui penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai seperti Rumah Sakit(RS. Umum Daerah), BKIA, Puskesmas, Apotik dan lain-lain. Sarana-sarana kesehatan ada juga yang dikelolah oleh pihak swasta. (Wawancara, AR, Mei, 2014).

#### **d. Peribadatan**

Untuk menjalankan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, penduduk membutuhkan wahana atau tempat dalam menjalankan ibadah berupa fasilitas peribadatan.

Adapun penilaian responden mengenai penempatan fasilitas peribadatan di kota bantaeng seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 10: Tanggapan Responden Mengenai Penempatan Fasilitas Peribadatan Di Kota Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Sesuai	3	15
Sesuai	12	60

Kurang Sesuai	5	25
Tidak Sesuai	-	-
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Berdasarkan penilaian persentase di atas, dimana 3 responden atau 15% menilai sangat sesuai, 12 responden atau 60% menilai sesuai, 5 responden menilai kurang sesuai dengan persentase 25%, dan tidak ada responden yang menilai tidak sesuai dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penempatan fasilitas peribadatan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam wawancara penulis salah seorang tokoh masyarakat kelurahan malilingi mengatakan bahwa:

Jenis dan besaran fasilitas ini tergantung pada jumlah penduduk pada pemeluk agama yang bersangkutan, pembangunan fasilitas peribadatan di daerah bantaeng khususnya malilingi mayoritas beragama islam sehingga peribadatan yang dibangun terbanyak adalah Mesjid dan Musallah pada pusat-pusat pemukiman.(Wawancara, HN, Mei, 2014)

### **3. Pembangunan Utilitas Kota**

Pembangunan utilitas di kota bantaeng penting artinya karena merupakan jenis sarana yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dan dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Dalam penulisan ini penulis akan membahas utilitas, yakni air bersih dan listrik.

#### **a. Penyediaan Air Minum (Air bersih).**

Penyediaan atau pelayanan air minum yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari di Kecamatan Bantaeng. Untuk mengetahui tingkat

pelayanan dalam hal ini kelancaran pengaliran air dari PDAM, maka kita dapat melihat dan penilaian responden pada tabel berikut:

**Tabel 11: Tanggapan Respondan Mengenai Kelancaran Pengaliran Air Di Kecamatan Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Lancar	-	-
Lancar	4	20
Kurang Lancar	3	15
Tidak Lancar	5	25
Tidak Relevan	8	40
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Dari tabel tersebut, dengan jelas memperlihatkan bahwa pengaliran air ke pelanggan air minum kurang lancar karena tidak ada responden yang menilai sangat lancar, 4 orang menyatakan lancar dengan persentase 20%, 3 orang yang menilai kurang lancar dengan persentase 15%, 5 orang yang menilai tidak lancar dengan persentase 25%, sedangkan yang menilai tidak relevan sebanyak 8 orang dengan persentase 40%, dan tergolong kedalam kategori kurang.

Berdasarkan jawaban responden di atas dapat dikatakan bahwa untuk penyediaan air bersih belum lancar sebagaimana yang diharapkan oleh warga. Berdasarkan pengamatan penulis disebabkan karena letak perumahan pada daerah ketinggian. Pengaliran air pada daerah-daerah ini diadakan pada waktu-waktu tertentu

misalnya untuk siang hari jam 10. – 14. Dan pada malam hari jam 10, Sampai subuh. Sedangkan responden yang menilai sangat lancar dan lancar, berdasarkan pengamatan penulis disebabkan letak perumahan mereka pada daerah-daerah yang rendah/rata.

Selanjutnya dari ke 20 responden, terdapat 8 responden yang tidak berlangganan air minum. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 12: Tanggapan Responden Sehingga Tidak Berlangganan Air Minum Di Kota Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Mahal	1	5
Pengurusan Sulit	1	5
Tidak Mampu	2	10
Tidak Berminat	4	20
Jumlah	8	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Melihat tabel di atas, dimana terdapat berbagai alasan responden tidak berlangganan air minum, yaitu 1 responden menilai sangat mahal dengan persentase 5%, 1 responden menilai pengurusan sulit dengan persentase 5%, 2 responden menilai tidak mampu dengan persentase 10%, dan 4 responden menilai tidak berminat dengan persentase 20%.

Tingginya persentase responden yang tidak berminat berlangganan air minum karena rumah-rumah mereka telah terdapat sumur yang kualitas airnya sangat baik

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari berbagai penjelasan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum (air bersih) di Kota Bantaeng cukup memadai.

#### **b. Listrik**

Listrik memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan warga kota secara keseluruhan karena mempunyai fungsi ganda yaitu di samping sebagai alat penerangan juga berfungsi sebagai sumber tenaga bagi industry dan berbagai kegiatan lainnya. Perkembangan kota beserta kegiataannya akan memerlukan penambahan listrik, baik daya maupun distribusi jaringan yang di perlukan. Bagaimana penilaian responden mengenai kebutuhan listrik di kota Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13: Tanggapan Responden Tentang Kebutuhan Listrik Di Kecamatan Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Butuh	5	25
Butuh	11	55
Kurang Butuh	4	20
Tidak Butuh	-	-
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Data pada tabel diatas, sangat jelas bahwa seluruh responden yang ada, terdapat 5 responden menyatakan dengan persentase 25% mengatakan sangat butuh, 11 orang menyatakan dengan persentase 55% yang menyatakan Butuh, dan 4 responden dengan

persentase 20% yang menyatakan tidak butuh, sedangkan yang menilai tidak butuh tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik di Kota Bantaeng secara keseluruhan terpenuhi dengan baik. Senada dengan yang dikemukakan oleh salah seorang pegawai kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng bahwa:

Penggunaan tenaga listrik ditujukan untuk meningkatkan pelayanan listrik bagi penduduk kota, baik yang menyangkut kapasitasnya maupun jangkauan pelayanan. Hal ini sangat penting di kembangkan dimasa yang akan datang mengingat kebutuhan akan listrik terus meningkat sesuai dengan perkembangan Kecamatan Bantaeng. (Wawancara, RS, Juni, 2014).

### **C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan RUTRWK Di Kecamatan Banateng**

Dari hasil olahan kuesioner dan wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota di Kecamatan Bantaeng. Kebijakan yang efektif adalah dengan memperhatikan Faktor-Faktor atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (1994) dalam Nawawi (2009:169) mencakup lima indikator, yaitu (1) Efektifitas, apakah hasil organisasi yang diinginkan tercapai, (2) Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah, (3) Pemerataan, apakah manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda, (4) Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat hasil/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka, (5) Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

## 1. Efektifitas

Tercapainya hasil serta tujuan evaluasi kebijakan program yang telah disusun dan telah dilaksanakan. Dan menurut Sadyohutomo (2008:63) yang menjelaskan bahwa Kegiatan penyediaan prasarana kota jika ditinjau dari tahapan penataan ruang termasuk tahapan aplikasi rencana. **Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.**

**Tabel 14: Tanggapan Responden Tentang Keefektifitasan Keberhasilan Program RUTRWK Yang Sudah Di Laksanakan Di kota Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Efektif	4	20
Efektif	5	25
Kurang Efektif	7	35
Tidak Efektif	4	20
Jumlah	20	100

*Sumber : hasil olahan data kuesioner,2014*

Berdasarkan tabel diatas, Hasil penelitian tentang apakah Efektifitas keberhasilan pelaksanaan program RUTRWK, Sebanyak 20% responden yang menyatakan sangat Efektif, 25 % responden yang menyatakan Efektif, 7 atau sekitar 35% responden yang menyatakan kurang Efektif. Ada juga responden mengatakan tidak Efektif dengan persentase 20 % Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya responden yang mengatakan keberhasilan program RUTRWK kurang Efektif maka

dapat di kategorikan pelaksanaannya menurut responden yang ada tidak maksimal. Menurut Informan mengenai keberhasilan program RUTRWK Bantaeng Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang staf pegawai Kantor Dinas Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng dalam wawancara penulis bahwa :

Perkembangan suatu kota dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh keadaan tofografi sebgai dasar pengembnagan kota, semakin baik tofografinya maka perkembangan pembangunan kota biasa efektif, Sementara kota bantaeng tampaknya kurang memberikan dukungan terhadap pembangunan fasilitas dan utilitas kota sesuai yang direncanakan RUTRWK, karena sebagian besar wilayah kota berupa dataran rendah, tentu rawan banjir dan ini menunjukkan tidak maksimalnya pelaksanaan pembangunan.(Wawancara, SH, Mei , 2014)

## 2. Kecukupan

Proses pencapaian program Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng yang dinilai cukup dan memadai kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 15: Tanggapan Responden Tentang Pencapaian Program RUTRWK Kepda Masyarakat di Kecamatan Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Memadai	3	15
Memadai	3	15
Kurang Memadai	10	50
Tidak Memadai	4	20
Jumlah	20	100

*Sumber : hasil olahan data kuesioner,2014*

Data pada tabel diatas, sangat jelas bahwa seluruh responden yang ada, terdapat 3 responden menyatakan dengan persentase 15% mengatakan sangat memadai, 3 orang menyatakan dengan persentase 15% yang menyatakan memadai, dan 10 responden dengan persentase 50% yang menyatakan kurang memadai, sedangkan yang menilai tidak memadai 4 orang dengan persentase 20%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di Kota Bantaeng secara keseluruhan kurang terpenuhi dengan baik. Senada dengan yang di kemukakan oleh Kepala Lurah Tappanjeng bahwa:

Meski pemerintah dalam hal ini yang memegang peranan penting untuk pembangunan daerah dalam kesejahteraan masyarakat kota,kita sebagai masyarakat harus membantu dalam hal pemanfaatan fasilitas yang baik, meski masih ada kekurangan dalam pelayanan baik sarana dan prasarana yang sudah ada namun pemerintah tetap akan membangun daerah Bantaeng yang lebih baik lagi dari hasil yang sudah ada. (Wawancara , JP, Mei , 2014).

### 3. Pemerataan

Suatu proses penyebaran rencana kerja atau program kerja dari kebijakan pemerintah secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda, pemerataan program rencana umum tata ruang wilayah kota bantaeng dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 16: Tanggapan Responden Tentang Meratanya Fasilitas Pembnagunan Pemerintah Kepada Masyarakat Kota Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
------------------	---------------	----------------

Sangat Merata	3	20
Merata	6	30
Kurang Merata	8	60
Tidak Merata	3	15
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Dari tabel di atas menunjukkan, 3 responden menilai sangat merata dengan persentase 20%, 6 responden menilai merata dengan persentase 30%, 8 responden menilai kurang merata, dan responden yang menilai tidak merata tentang pemerataan program RUTRWK 3 orang dengan persentase 15%, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan pemerataan program RUTRWK untuk masyarakat Kota Bantaeng kurang merata pada bagian wilayah.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kelurahan masyarakat Letta Tentang pemerataan program pemerintah pada wawancara penulis bahwa:

Perencanaan pemerintah dalam penataan dan pemanfaatan ruang kota menurut saya sudah cukup bagus tinggal bagaimana caranya agar program ini berjalan sesuai yang direncanakan, jangan ada lagi penyimpangan jika peruntukannya untuk rakyat maka haknya harus diberikan demi kemajuan masyarakat kota yang lebih baik kedepan.(Wawancara, SN, Mei, 2014).

#### **4. Responsivitas**

Tanggapan responden atau masyarakat tentang kebijakan atau program yang akan dilaksanakan di kota bantaeng dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 17: Tanggapan Responden Tentang Responsivitas Masyarakat Terhadap Program RUTRWK Di Kecamatan Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Merespon	3	15
Merespon	6	30
cukup Merespon	11	55
Tidak Merespon	-	-
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa penilaian responden tentang responsivitas masyarakat terhadap program RUTRWK Pemerintah Bantaeng adalah 3 orang dengan persentase 15% yang menyatakan sangat merespon, 6 orang dengan persentase 30% yang menyatakan merespon, 11 responden dengan persentase 55% yang menyatakan cukup merespon, serta tidak ada responden yang menilai tidak merespon,

Bila dilihat secara keseluruhan penilaian responden tentang respon masyarakat terhadap RUTRWK pemerintah dari persentase di atas menunjukkan bahwa masyarakat mendukung pemerintah setempat dalam rencana pembangunan daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Kelurahan Lembang pada wawancara penulis bahwa:

Kami sebagai masyarakat tentu sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah dan instansi lain dapat merencanakan pembangunan kota bantaeng saya kira kita biasa merujuk pada daerah lain dalam pembanguan daerah pemanfaatan ruang harus sesuai peruntukaannya jangan sampai dirusak dan digeser aturan demi kepentingan pribadi.(Wawancara, SL, Mei 2014 ).

## 5. Ketepatan

Ketepatan program pemanfaatan ruang wilayah kota Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18: Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Program Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng**

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Sangat Tepat	4	20
Tepat	13	65
Kurang Tepat	3	15
Tidak tepat	-	-
Jumlah	20	100

*Sumber Hasil Olahan Kuesioner, 2014*

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa responden yang menilai sangat tepat ada 4 orang dengan persentase 20%, responden yang menilai tepat 13 orang dengan persentase 65,00%, kemudian 3 orang dengan persentase 15,00% mengatakan kurang tepat, dan tidak ada responden yang menilai tidak tepat, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan pelaksanaan program cukup tepat. Sebagai mana yang di kemukakan salah seorang tokoh masyarakat pallantikang pada wawancara penulis bahwa:

Apa yang telah direncanakan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas bagi masyarakat kota dalam upaya peningkatan pembangunan daerah infrastruktur yang mendukung tata ruang wilayah kota, seperti perbaikan jalan dan sebagainya.(Wawancara, DY, Juni 2014).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng dilihat dari aspek pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukannya, dapat dikategorikan kurang efektif, karena masih terdapat sejumlah pelanggaran / pergeseran pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam aspek pembangunan fasilitas yang meliputi fasilitas pemerintahan masuk kategori sedang, fasilitas pendidikan masuk kategori cukup baik, fasilitas peribadatan masuk masuk kategori cukup baik, fasilitas kesehatan masuk kategori sedang. Pada aspek pembangunan utilitas yang meliputi air bersih dan listrik masuk kategori telah dianggap sedang karena untuk penyediaan utilitas air, sebagian responden menyatakan bahwa air masih kurang, sedang listrik masuk kategori cukup baik, sehingga secara keseluruhan yang dicapai dalam pembangunan fasilitas dan utilitas masuk kategori sedang, artinya pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota (RUTRWK) Bantaeng dalam aspek fasilitas dan utilitas telah terlaksana walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota (RUTRWK) Bantaeng dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan RUTRWK yaitu : (a). Responsivitas, Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui sosialisasi (b). Ketepatan, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan RUTRWK yaitu : (a). Efektifitas, pelaksanaan RUTRWK sangat tergantung pada keadaan topografi, (b).Kecukupan, (Keterbatasan dana, sangat sulit bagi pemerintah daerah memberikan dukungan dana untuk fasilitas Umum/social yang cepat guna mengimbangi kebutuhan masyarakat yang serba berubah secara cepat dan dinamis) (c) Pemerataan, Keadaan Fisik Kota Bantaeng (mementingkan Ruang/wilayah yang strategis untuk membangun).

## **B. Saran-Saran**

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus berupaya agar dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang untuk tetap mempedomani RUTRWK, karena Jika pelanggaran terhadap RUTRWK selalu dilakukan, maka dimasa depan pengendalian tata ruang tidak dapat lagi dilaksanakan dan akan mengakibatkan penataan kota sulit dilaksanakan.

2. Dalam hal pembangunan sarana pemerintahan diharapkan agar dapat meningkatkan hal yang telah dicapai, bahkan mengupayakan adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kota, demi untuk kota yang mampu melayani warganya utamanya sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan tetap berpedoman pada RUTRWK yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Anderson, James E. 1984. *Publik Police Making*. Holt Rinehart and Winston, New York.
- Abidin, Said Zaenal. *Kebijakan Publik*. Jakarta, Pancar Siwah, 2004.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1978:1995.
- Hill, Michel, 2006, dan peter hupe, *Implementing Public Policy*, London sage.
- Harun dan Sumardi., 2006, *Kemunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*, Mandar Maju Bandung.
- Jones, Carles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Johan Djohermansyah, 2007, *Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Jayadinata, T. Johara, 1986, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB, Bandung.
- Nawawi Ismail, 2009, *Public Policy, Analisis, Strategis Advokasi Teori, dan Praktek*. PMN, Surabaya. S
- Nugroho D, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta, Elekx Media Komputindo.
- Ndraha, Taliziduhu, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- Rahmat Jalaluddin, 2005, *Kemunikasi Politik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Subarsono, AG, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung
- Sadyohutomo, Mulyono, MRCP, 2008, *Manajemen Kota dan Wilayah : Realita dan Tantangan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Suryabarata Sumajdi, 1985, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta.

Tarigan, Robinson, M.R.P., 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah : Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Terry, George R., *Terjemahan Prinsip-Prinsip Manajemen*, oleh , J. Smith D.F.M, Cet ke-VI. Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Young, Eoin dan Lisa Quinn. *Writing Effectife Publicy Policy Paper: A Guide of Edvisers in Central and Eastem Europe*, Budapaset: Local Government and Public Service Reform Initiative, 2002.

Yunus Sabari Hadi, 2008, *Manajemen Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **Dokumen-Dokumen**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 2012 - 2032

Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Kota Bantaeng, 2012